



**PEMERINTAH
KOTA
MAGELANG**

RENCANA KERJA TAHUN 2019

2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan (Renja OPD) yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan APBD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

Oleh karena itu berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasubid pada Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibaas dalam rapat struktural Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk dibahas dan ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019 juga sebagai bahan untuk penyusunan

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 dimana dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019, disebutkan pada Bab I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Magelang tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga perencanaan tahap III pelaksanaan RPJMD 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 050/ 104 /112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2019 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Tujuan dibuatnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPKAD
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di BPKAD Kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD Tahun 2019 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala BPKAD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penullisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2017 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Magelang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Magelang
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA MAGELANG

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Magelang
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2017 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut dinyatakan bahwa BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BPKAD pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penambahan fungsi pegelolaan barang milik daerah. Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Secara umum tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar tugas tersebut maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah; pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah; pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung; pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah; serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

2.1.1. Evaluasi Capaian RENJA BPKAD Kota Magelang Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017, BPKAD mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

- A. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 45.709.001.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.495.402.468,- dengan capaian 112,66%. Pendapatan Daerah ini terdiri dari

4 komponen pendapatan, yaitu : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen tersebut rata-rata memiliki capaian melebihi target anggaran. Dan komponen penyumbang pendapatan terbesar adalah dari komponen hasil pajak daerah. Dimana dengan target pendapatan sebesar Rp. 29.821.800.000,- berhasil terealisasi sebesar RP. 31.206.960.485,- atau 112,66%. Untuk pajak daerah itu sendiri terdiri dari 10 jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- B. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.099.700.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 22.841.738.991,- atau sebesar 84,89%.
- C. Belanja Langsung sebesar Rp. 18.809.072.000,- yang terdiri dari 8 Program 130 kegiatan. Sesuai data realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2017 dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kota Magelang sudah *on the track* dan relatif baik. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi sebesar Rp. 16.361.640.076,- , atau 86,99% dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.332.521.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.105.071.743,-, dengan capaian 90,25%.
 - 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.714.398.000,-, terealisasi sebesar Rp. 2.189.190.890,- dengan capaian 80,65%.
 - 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 234.648.000,- terealisasi sebesar Rp 229.384.900,- , dengan capaian 97,76%.
 - 4. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 7.823.310.000,- , terealisasi sebesar Rp. 7.079.642.328,- dengan capaian 90,49%.
 - 5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 704.278.000,-, terealisasi sebesar 473.641.790,- dengan capaian sebesar Rp. 67,25%.
 - 6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan pagu anggaran Rp. 136.130.000,-, terealisasi sebesar Rp. 132.810.050,- dengan capaian sebesar 97,56%.

7. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.622.549.000,-, terealisasi sebesar Rp. 2.973.939.250,- dengan capaian 82,10%.
 8. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.241.238.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.177.959.125,- dengan capaian sebesar 94,90%.
- D. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sebanyak 130 kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan (3,08%) yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu serapan anggarannya kurang dari 50%, antara lain:
1. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan serapan anggaran sebesar 41,03%.

Kegiatan ini merupakan kegiatan refill tabung gas dan pengisian BBM Genset untuk memenuhi kebutuhan logistic kantor. Serapan anggaran sebesar 41,03% dikarenakan efisiensi, yaitu penghematan dalam pemakaian gas dan BBM Genset. Apabila listrik PLN jarang padam maka BBM Genset yang digunakan hanya untuk memanasi mesin genset secara rutin.
 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan serapan anggaran sebesar Rp. 41,94%.

Kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa pemeliharaan alat-alat kantor dan jasa untuk pemeliharaan jaringan pengelola keuangan daerah dan pendapatan dilaksanakan dengan melihat jenis kerusakan yang perlu diperbaiki, dilaksanakan oleh pihak ketiga. Serapan anggaran sebesar 41,94% dikarenakan efisiensi/penghematan. Pemakaian peralatan gedung kantor dilaksanakan secara baik dan benar sehingga mengurangi biaya pemeliharaan. Adapun untuk anggaran tetap dialokasikan sesuai jumlah peralatan/jaringan yang ada karena semua vital/penting dan terhubung dalam suatu sistem sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi troubel bisa segera ditindaklanjuti untuk pemeliharaannya.
 3. Kegiatan Penjualan Aset Daerah dengan serapan anggaran sebesar 46,09%.

Kegiatan ini memiliki output berupa 5 paket penjualan, yaitu : 1) Paket penjualan kendaraan perorangan dinas pada Setda dan material hasil bongkar garasi Setwan, 2) Paket Penjualan Material hasil bongkaran Gedung Kantor dan Rumdin Kec. Magelang Tengah, Material hasil bongkaran talud, mushola, MCK UPTD Psr. Cacaban, Material hasil bongkaran gedung aula 2 ruang pelayanan PLN Kel. Rejo. Utara, 3)

Penjualan material hasil bongkaran rumah jabatan Walikota, 4) Penjualan kayu Log hasil penebangan Taman Joglo, 5) Penjualan material hasil bongkaran Gazebo Satpol PP. Prosentase realisasi anggaran hanya sebesar 46,09% dikarenakan efisiensi pada belanja jasa konsultan penilai publik, dan belanja jasa pengumuman lelang.

4. Pengelolaan Data dan Informasi PBB dengan serapan anggaran sebesar 41,75%.

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi PBB merupakan kegiatan dalam rangka mengelola data terkait obyek dan subyek PBB meliputi pencetakan SPPT, pelayanan perubahan data PBB P2 serta pendataan dan pemutakhiran data obyek PBB P2. Dalam kegiatan pemutakhiran data PBB P2 tersebut bekerjasama dengan pihak ketiga. Dimana dalam pelaksanannya pihak ketiga yang sudah ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak. Maka sesuai dengan aturan pekerjaan tersebut tidak dibayar, yang berarti terdapat efisiensi anggaran.

- E. Pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung yang memiliki serapan anggaran antara 50-80% sebanyak 16 kegiatan atau 12,31% dari keseluruhan kegiatan.
- F. Pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung yang memiliki serapan anggaran lebih dari 80% sebanyak 110 kegiatan atau sebesar 84,61% dari keseluruhan kegiatan.

2.1.2. Evaluasi Capaian RENSTRA Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021

- A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program BPKAD pada RPJMD Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target 2017	Realisasi 2017
1.	Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	60%	72,44%
2.	Barang Milik Daerah yang didayagunakan	90%	100%
3.	Pelaporan Semesteran BMD yang tepat waktu	50%	100%
4.	Pelaporan Tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%
5.	Prosentase pertumbuhan PAD	18,44%	5,67%

6.	Prosentase laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SA	81%	100%
7.	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	13,48%	13,37%
8.	Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	4,20%	2,67%

Berdasarkan hasil desk capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan terdapat pokok-pokok pikiran terhadap capaian indikator yang kurang memenuhi target dan perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase Pertumbuhan PAD

Definisi operasional dari indikator ini adalah Perbandingan antara kenaikan PAD tahun (x) dengan PAD tahun (x)-1 dikali 100%. Adapun capaian kurang memenuhi target dikarenakan Pendapatan BLUD RSU selain sebagai komponen penyumbang PAD juga ikut sebagai komponen pembagi.

2. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD

Definisi operasional dari indikator ini adalah penerimaan retribusi daerah dibagi dengan penerimaan PAD dikali 100%. Capaian kurang bisa memenuhi target dikarenakan penerimaan retribusi tidak bisa maksimal yang disebabkan ada sebagian penerimaan retribusi yang dialihkan ke pos penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

B. Evaluasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Magelang pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Seperti telah disebutkan pada Bab I bahwa guna mendukung pencapaian Misi 1 pada RPJMD Kota Magelang, BPKAD Kota Magelang memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi	
		2016	2017	2016	2017
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif.	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP

Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Derajat Otonomi Fiskal	21,40%	22,52%		34,82%
	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat	80,27%	73,66%		61,16%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Nilai Opini BPK atas LKPD

Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern/ Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun secara rutin oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang, pada Tahun 2017 ini Pemerintah Kota Magelang berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya.

Namun demikian dalam memperoleh predikat WTP ini tak lepas dari beberapa kendala, diantaranya ;

- a. Kendala dari Bidang Aset :

- Terdapat beberapa aset dari rehab gedung/kantor yang belum dicatatkan jadi 1 dengan induknya.
- Pelaporan Barang dari OPD yang masih kurang informatif.
- Kurang valid dan terupdatenya data Laporan Barang Milik Daerah karena di dalam penyusunan Laporan Barang belum menggunakan aplikasi (masih manual).
- Masih ditemui Barang-barang Pengelola yang belum ada catatan pemiliknya, misal : tanah yang tak bertuan, dan sebagainya.

Progres/solusi :

- Untuk mengatasi kendala dari permasalahan beberapa aset dari rehab gedung/kantor yang belum menyatu dengan induknya adalah dengan melaksanakan rekonsiliasi dan penelusuran data secara kontinyu.

- Untuk pelaporan barang yang masih kurang informatif diatasi dengan melaksanakan asistensi Pengurus Barang.
- Untuk kendala ini pada Tahun 2017 sudah diadakan aplikasi SIMDA BMD yang sesuai dengan rekomendasi dari BPK dan sudah running pada Triwulan IV ini.
- Untuk mengatasi kendala dari permasalahan Tanah yang Tidak Bertuan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan : Inventarisasi Tanah Milik Pemda.

b. Kendala dari Bidang Akuntansi :

- Kompetensi SDM dari Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang yang ada di sekolah-sekolah terutama Sekolah Dasar masih kurang. Hal ini dikarenakan pada Sekolah Dasar belum terdapat pegawai yang khusus menangani pengelolaan keuangan dan barang sehingga pekerjaannya dirangkap oleh guru yang ada.
- Pengoptimalan pengelolaan Dana BOS Sekolah.
- Pencatatan pelaporan barang belum dilaksanakan secara akrual murni.

Progres/solusi :

- Pengoptimalan tenaga-tenaga atau karyawan/karyawati yang ada di sekolah.
- Melaksanakan monev dana BOS secara bulanan serta pengintensifan pelaksanaan rekonsiliasi dan pembinaan dengan sekolah-sekolah.
- Dalam rangka menuju pencatatan barang secara accrual murni, pada Laporan Keuangan telah terdapat aplikasi Akumulasi Penyusutan yang telah terkoneksi dengan SIMDA BMD.

• Derajat Otonomi Fiskal

Definisi operasional dari derajat otonomi fiskal adalah Kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

Pada tahun 2017 ini indikator berhasil diraih dengan capaian 34,82% dari target sebesar 22,82%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah semakin baik.

- Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat

Ukuran indikator kinerja Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Pada tahun 2017 ini berhasil dicapai 61,16% dari target sebesar 73,66%. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Magelang terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi semakin menurun. Berarti pula indikator tercapai sesuai yang diharapkan.

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran tersebut pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2017 sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Capaian seluruh sasaran bernilai sangat baik, artinya seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2017 telah sejalan dengan perencanaan kerja dan guna mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 banyak hal terkait inovasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Selain inovasi-inovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi, juga dilaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan baru. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang dan pencapaian Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang bisa dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 KOTA MAGELANG**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2.18 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Teradministrasinya surat-surat dinas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet untuk memperlancar pelaksanaan tugas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan	64	unit	61	unit	77	STNK	77	STNK	100%	64	unit	40	STNK	50%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan di lingkungan BPKAD	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya kelancaran tugas dinas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnya kelancaran tugas-tugas dinas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah wawasan pengetahuan aparat	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2	jenis	1	jenis	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya logistik kantor	24	tabung	24	tabung	24	tabung	100%	24	tabung	12	tabung	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tercapainya koordinasi antar daerah	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan	23	orang	7	orang	23	Orang	100%	23	Orang	23	Orang	100%		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	kelancaran urusan kepegawaian	82	file	82	file	82	file	100%	82	dokumen	70	dokumen	50%		

4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor			6	jenis	3	jenis	3	jenis	100%	12	jenis	9	jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung terpelihara	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	2	unit	50%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	64	unit	61	unit	70	unit	70	unit	100%	64	unit	131	unit	40%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	33	unit	34	unit	41	unit	41	unit	100%	33	unit	75	unit	40%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	7	jenis	8	jenis	7	jenis	7	jenis	100%	7	jenis	15	jenis	60%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya sarana kerja kantor	20	buah	20	buah	29	buah	29	buah	100%	20	buah	49	buah	40%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya tempat parkir mobil, kanopi dan gudang di lingkungan BPKAD			3	unit	237,0 0	m2	237,00	m2	100%	240	M2	240	M2	100%
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	tercapainya target kinerja skpd	12	dokumen	12	bulan	12	dokumen	12	dokumen	100%	12		24		50%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	3	laporan	3	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	5	jenis	5	jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	terwujudnya pedoman rencana kerja skpd	2	dokumen	2	jenis	2	dokumen	2	dokumen	100%	2		4		50%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	terwujudnya pelaksanaan anggaran	2	dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	1		2		50%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	terwujudnya renstra OPD 5 tahunan	1	dokumen			1	dokumen	1	dokumen	100%					
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	spj yang diverifikasi dan disahkan	12	bulan	12	bulan	1.800	berkas	1.800	berkas	100%	1000		1.812		50%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) OPD	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	1	dokumen	1	jenis	1	dokumen	1	dokumen	100%	2		2		100%
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah															
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sebagai pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal	75	buku	75	buku	75	buku	100%			151		0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Penetapan Perda tentang APBD TA. 2018	4	dokumen			4	dokumen	4	dokumen	100%	4	dokumen	8	dokumen	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD TA. 2018	3	dokumen			3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	6	dokumen	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2017	4	dokumen			4	dokumen	4	dokumen	100%	4	dokumen	8	dokumen	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD 2017	4	dokumen			4	dokumen	4	dokumen	100%	4	dokumen	8	dokumen	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	520	buku	468	buku	1	perda	1	perda	100%	520	buku	989	buku	50%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	120	buku	120	buku	1	perwal	1	perwal	100%	120	buku	120	buku	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Menambah kelancaran pelaksanaan tugas	3	laporan			2	aplikasi	2	aplikasi	100%	12				
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel			3	jenis	3	laporan	3	laporan	100%	20	laporan			
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	Tertatinya dokumen pencairan dana belanja langsung elektronik														
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Termonitornya dan terpenuhinya laporan posisi kas daerah kepada Kementerian Keuangan RI setiap bulan														
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUA 2018	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Nota Kesepakatan PPAS 2018	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUPA 2017	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKPA 2017	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	40%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 2018	48	SKPD	135	buku	29	opd	29	opd	100%	48	SKPD			
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang disyahkan	48	SKPD	48	skpd	29	opd	29	opd	100%	48	SKPD			
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Tertib Administrasi	370	berkas	360	berkas	500	bekas	500	bekas	100%	370	berkas	100	berkas	40%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja	100	%	3000	SP2D	3.000	SP2D	3.000	SP2D	100%	100	%			50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Sebagai dasar penerbitan SP2D	100	%	170	SP2D	170	SP2D	170	SP2D	100%	100	%			50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	612	buku	612	buku	12	dokumen	12	dokumen	100%	612	buku			50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	552	laporan	552	laporan	348	laporan OPD	348	laporan OPD	100%	552	laporan	200	laporan	40%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	100	%	1500	SPM	1.800	spm	1.800	spm	100%	100	%			60%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	100%	29	SKPD	29	SKPD	70%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	tersedianya laporan pajak setiap bulan	84	buku	84	buku	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan anggaran lebih transparan dan akuntabel	2	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	1	laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	Sebagai rencana penarikan dana pada setiap triwulan	100	%	75	buku	170	dokumen	170	dokumen	100%	100	%			50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA sesuai dengan Perda dan Perwal penjabaran perubahan APBD 2017	48	SKPD	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29	OPD			

4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA opd yang disyahkan	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	48	OPD	100%	29	OPD		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Kemudahan dalam mengakses arsip dokumen anggaran	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	29	OPD	29	OPD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	100	%			2.500	berkas	2.500	berkas	100%	2500	berkas	800	berkas
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	Tersusunnya data keuangan daerah yang akuntabel										12	bulan	6	Bulan
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	100	%			12	laporan	12	laporan	100%	100	%		50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	100	%	12	bulan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	Bulan
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Meningkatnya kapasitas pengelola keuangan sekolah dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah										74	Bendahara sekolah		50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah										1	kegiatan	1	kegiatan
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	100	orang	60	orang	100	orang	100	orang	100%	100	orang	100	orang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan SP2D	1350	SP2D	1350	SP2D	1.400	SP2D	1.400	SP2D	100%	1350	dokumen	700	dokumen
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	88	buku			1	dokumen	1	dokumen	100%	1	buku		40%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Kelancaran administrasi bansos	100	%	12	bulan	1.500	berkas	1.500	berkas	100%	100	%		50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Akuntabilitas keuangan SP2D	100	%			3.000	berkas	3.000	berkas	100%	4	informasi		50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Tersedianya pedoman penganggaran kegiatan	3	dokumen	185	buku	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan tersedianya laporan			4	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	laporan
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan SP2D					1.400	SP2D	1.400	SP2D	100%	1400	dokumen	800	dokumen
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Terciptanyanya sistem penganggaran yang tepat dan sistematis di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal			1	dokumen	1	dokumen	100%	6	Perwal		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya seluruh database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.					1	laporan	1	laporan	100%	12	laporan	6	laporan

4.04 . 4.04.01 . 15 . 115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang Akuntabel										29	OPD			50%
2.18 . 4.04.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah															
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	pengamanan arsip dppkd kota magelang				40000	dokumen	40000	dokumen	100%	6	bidang			70%	
4.04 . 4.04.01 . 18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah															
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	4	laporan	100	wajib pajak	4	laporan	4	laporan	100%	4 / 1	Laporan / keg			50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02	Penyusunan Laporan Data Potensi Subjek dan Obyek Pajak	Tersusunnya Data Potensi Pajak Daerah	2	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	2	laporan			40%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03	Evaluasi Bulanan Dan Triwulan PAD Dan PBB	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	12	laporan	12	laporan	12	kali	12	kali	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Tersedianya laporan perkembangan realisasi PAD	12	laporan			12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	Tersesaiakannya Tunggakan Pajak Daerah	120	laporan			120	Wajip Pajak	120	data wajib pajak	100%	120	Wajip Pajak	60	Wajip Pajak	50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06	Intensifikasi Pemungutan PBB	Tercapainya Target Penerimaan PBB-P2, tercapainya pendistribusian PBB, Pelaksanaan PBB Panutan, dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelurahan, RW, RT, Wajib Pajak	4	kegiatan	4	keg	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	3 / 36200	Keg / SPPT			70%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	Tertib Administrasi PBB-P2	28	laporan	12	laporan	28	laporan	28	laporan	100%	28	laporan	17	laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Tercapainya target PAD	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	laporan	60%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6	bulan	50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Tercapainya target PAD	12	laporan			12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	Data piutang PBB-P2 yang valid	6	bulan	2	jenis	6	bulan	6	bulan	100%	6	bulan		bulan	10%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya pengelolaan yang akuntabel	12	laporan			12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	6	laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	meningkatnya pendapatan dan tertib administrasi wajib pajak	20	laporan			200	wajib pajak	200	wajib pajak	100%	4	LHP WP	4	LHP WP	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	terwujudnya tertib administrasi dan terinformasikannya realisasi pencairan dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan					16	laporan	16	laporan	100%	16	laporan	10	laporan	60%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	Adanya kenaikan estimasi potensi PBB-P2	100	Objek Pajak			17	kelurahan	17	kelurahan	100%	17	kelurahan			50%

4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Tercapainya target PAD					350	wajib pajak	350	wajib pajak	100%	540	wajib pajak			50%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terselesaikannya Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	50	SK	50	sk	50	SK	50	SK	100%	50	SK			40%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	Terselenggaranya sistem pendapatan daerah yang tepat dan sistematis jajaran pemerintah kota Magelang					1	dokumen	1	dokumen	100%					
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah															
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtempaan	Tersedianya data untuk dijual					1	kegiatan	1	kegiatan	100%	3	kecamatan			30%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Termenfaatkannya aset secara optimal					1	tahun	1	tahun	100%	1	kegiatan			10%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03	Pemusnahan Barang Milik Daerah	Surat persetujuan pemusnahan					1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan			
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Berita acara penelitian dan penjualan dan/atau pemusnahan					3	kegiatan	3	kegiatan	100%	4	kegiatan			70%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	Jalan di Komplek belakang kantor walikota Magelang					2	jenis	2	jenis	100%	1	paket			50%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Terwujudnya sarana olahraga pengelola barang yang layak dan nyaman					2	lapangan	2	lapangan	100%	2	lapangan			50%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	meningkatnya kenyamanan tugas					3	unit	3	unit	100%	3	gedung			20%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan BMD	12	bulan			12	bulan	12	laporan	100%	12	bulan	6		50%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	Terhapusnya aset-aset pemkot yang sudah tidak layak							1	paket			2	kegiatan		15%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Terpantauanya pengelolaan barang milik daerah	3	kegiatan			16	orang	16	orang	100%	16	orang	8		60%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Tersedianya informasi barang milik daerah	600	%			6	jenis	6	jenis	100%	6	jenis			60%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan asset daerah	Bertambahnya pendapatan asli daerah	100	%			5	paket	5	paket	100%	1	paket			40%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan asset daerah	Teramankannya aset-aset daerah	1200	%			12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	6		60%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	Tersedianya data dalam rangka tindak lanjut atas aset yang telah ditaksir	400	%			4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4	kegiatan	2		70%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan kemampuan petugas pengelola BMD					4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4	kegiatan	2		50%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD)					3	kecamatan	3	kecamatan	100%	7	jenis			20%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah					2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen			10%

4.04 . 4.04.01 . 19 . 21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan penatgunaan tanah Pemkot dan tersedianya data tanah Pemkot yang akurat	300	%			300	%	3	kecamatan	1%	12	kegiatan			10%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Terkendalinya pemberian hak atas tanah negara	100	%			100	%	100	%	100%	100	%			5%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot	12	bidang			12	bidang	18	bidang	100%	12	kegiatan			5%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Tersedianya data tanah milik Pemkot yang mutakhir	100	%			1	laporan	1	laporan	100%	1	kegiatan			5%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Terwujudnya batas fisik tanah	200	%			2	bidang	2	bidang	100%	2	kegiatan			30%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan										10	kendaraaan			50%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Pembayaran PBB untuk gedung kantor/rumdin/mess tepat waktu	100	%			6	SPPT	6	SPPT	100%	100	%			80%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Pembayaran PBB tanah milik Pemda	100	%			198	tanah	198	tanah	100%	100	%			80%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Terwujudnya rumah dinas dan mess yang layak dan nyaman					6	rumah	6	rumah	100%	7	Bangunan			30%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas										10	kendaraan			40%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	Terpantaunya Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan					4	laporan	4	laporan	100%	4	laporan			5%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Magelang

Pelaksanaan program kegiatan pada BPKAD Kota Magelang pada Tahun 2017 sebagian besar sesuai dengan Renja BPKAD Tahun 2017 dan dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan, adapun kinerja dari BPKAD Kota Magelang secara detail dapat dilihat pada tabel Laporan Kinerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2017. Adapun laporan kemajuan masing-masing program/ kegiatan pada BPKAD Kota Magelang per 31 Desember 2017 bisa dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Tabel Laporan Kemajuan Kegiatan BPKAD Kota Magelang
Per 31 Desember 2017

Program/Kegiatan	LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	Realisasi			
	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Setelah Perubahan	Fisik (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2017	85.000.000,00	100,00%	34,765,000,00	40,90%
Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	100,00%	981,500	98,15%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	313,900,000	100,00%	227,656,148	72,53%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30,530,000	100,00%	28,211,920	92,41%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	724,641,000	100,00%	703,428,500	97,07%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	89,482,000	100,00%	85,412,327	95,45%
Penyediaan alat tulis kantor	37,338,000	100,00%	36,863,000	98,73%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,900,000	100,00%	28,444,700	92,05%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	45,600,000	100,00%	29,644,500	65,01%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14,357,000	100,00%	13,500,000	94,03%
Penyediaan bahan logistik kantor	13,950,000	100,00%	5,724,000	41,03%
Penyediaan makanan dan minuman	120,132,000	100,00%	106,530,500	88,68%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260,445,000	100,00%	256,823,935	98,61%
Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	446,666,000	100,00%	411,788,720	92,19%
Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30,400,000	100,00%	21,300,451	70,07%
Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	62,918,000	100,00%	62,708,992	99,67%
Pengelolaan administrasi kepegawaian	110,262,000	100,00%	86,052,550	78,04%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100,00%		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	399,000,000	100,00%	361,601,500	90,63%
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	91,899,000	100,00%	83,814,000	91,20%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	41,704,000	100,00%	41,441,700	99,37%
Pengadaan peralatan gedung kantor	426,813,000	100,00%	398,942,625	93,47%
Pengadaan mebelleur	75,748,000	100,00%	75,738,750	99,99%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	181,550,000	100,00%	180,920,000	99,65%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	133,232,000	100.00%	107,818,500	80,93%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	697,309,000	100.00%	424,230,707	60,84%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	32,035,000	100.00%	17,265,000	53,89%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	232,275,000	100.00%	97,426,408	41,94%
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	10,450,000	100.00%	10,450,000	100%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	392,383,000	100.00%	389,541,700	99,28%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	58,835,000	100.00%	58,236,950	98,98%
Penyusunan laporan keuangan semesteran	11,297,000	100.00%	11,271,850	99,78%
Penyusunan Rencana Kerja OPD	21,401,000	100.00%	20,640,300	96,45%
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	40,522,000	100.00%	38,662,300	95,41%
Penyusunan Rencana Strategis OPD	10,000,000	100.00%	8,574,400	85,74%
Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	79,742,000	100.00%	79,739,100	100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	12,851,000	100.00%	12,260,000	95,40%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	56,356,000	100.00%	52,279,500	92,77%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	405,534,000	100.00%	394,015,610	97,16%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	233,164,000	100.00%	225,805,400	96,84%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	344,285,000	100.00%	334,814,166	97,25%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	337,707,000	100.00%	313,472,000	92,82%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	202,869,000	100.00%	200,660,000	98,91%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	219,773,000	100.00%	216,574,500	98,54%
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	113,900,000	100.00%	108,567,500	95,32%
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	288,598,000	100.00%	235,583,365	81,63%
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	151,821,000	100.00%	117,766,000	77,57%
Penyusunan Kebijakan Umum APBD	211,457,000	100.00%	198,578,153	93,91%
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	95,597,000	100.00%	88,042,600	92,10%
Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	177,776,000	100.00%	164,018,750	92,26%
Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	92,704,000	100.00%	85,131,750	91,83%
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	38,809,000	100.00%	33,809,000	87,12%
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	81,312,000	100.00%	73,919,000	90,91%
Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	148,205,000	100.00%	133,557,647	90,12%

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	172,601,000	100.00%	166,110,613	96,24%
Pengesahan dan penerbitan SPD	82,303,000	100.00%	76,298,100	92,70%
Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	210,156,000	100.00%	200,726,850	95,51%
Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	103,200,000	100.00%	97,756,500	94,73%
Pengendalian dan penerbitan SPM	32,286,000	100.00%	32,277,650	99,97%
Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	71,320,000	100.00%	64,833,800	90,91%
Penyusunan laporan pajak	88,660,000	100.00%	88,344,000	99,64%
Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	25,108,000	100.00%	22,303,425	88,83%
Penyusunan anggaran kas	18,553,000	100.00%	18,529,425	99,87%
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	41,263,000	100.00%	36,093,500	87,47%
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	54,369,000	100.00%	44,219,000	81,33%
Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	79,893,000	100.00%	76,019,000	95,15%
Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	203,620,000	100.00%	142,082,803	69,78%
Penghapusan Asset	76,939,000	100.00%	62,395,150	81,10%
Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	106,848,000	100.00%	103,578,350	96,94%
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	58,023,000	100.00%	57,840,700	99,69%
Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	526,109,000	100.00%	425,759,279	80,93%
Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	103,151,000	100.00%	94,660,000	91,77%
Penjualan aset daerah	114,308,000	100.00%	52,683,950	46,09%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	263,863,000	100.00%	240,957,805	91,32%
Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan	74,048,000	100.00%	63,142,350	85,27%
Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	75,750,000	100.00%	67,706,250	89,38%
Penyelamatan aset daerah	279,390,000	100.00%	267,631,592	95,79%
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	53,998,000	100.00%	53,570,000	99,21%
Penaksiran barang milik daerah	67,007,000	100.00%	56,446,950	84,24%
Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	125,411,000	100.00%	117,538,975	93,72%
Penyusunan laporan tugas pembantuan	27,246,000	100.00%	23,503,090	86,26%
Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	26,925,000	100.00%	26,350,275	97,87%
Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	122,905,000	100.00%	109,420,650	89,03%
Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	452,253,000	100.00%	439,441,225	97,17%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83,608,000	100.00%	53,314,600	63,77%
Optimaliasasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	44,194,000	100.00%	41,699,400	94,36%
Pembuatan Daftar Gaji	387,624,000	100.00%	355,294,150	91,66%
Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	54,405,000	100.00%	50,808,330	93,39%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	108,649,000	100.00%	108,095,450	99,49%

Penyusunan Peraturan Perundang- undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	54,595,000	100.00%	49,611,000	90,87%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	49,440,000	100.00%	39,890,100	80,68%
Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan	50,000,000	100.00%	32,851,050	65,70%
Penyusunan Dokumen tentang Rekening Belanja Daerah	43,668,000	100.00%	33,524,000	76,77%
Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	9,754,000	100.00%	9,738,050	99,84%
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	77,402,000	100.00%	58,820,250	75,99%
Peningkatan status tanah yang dimohon warga	37,924,000	100.00%	30,710,300	80,98%
Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	488,540,000	100.00%	294,971,290	60,38%
Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	88,162,000	100.00%	82,157,950	93,19%
Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda	12,250,000	100.00%	6,982,000	57,00%
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	136,130,000	100.00%	132,810,050	97,56%
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	527,430,000	100.00%	470,527,500	89,21%
Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	33,295,000	100.00%	33,277,120	99,95%
Evaluasi Bulanan Dan Triwulan PAD Dan PBB	50,094,000	100.00%	49,598,520	99,01%
Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	150,800,000	100.00%	141,241,100	99,66%
Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	132,457,000	100.00%	130,920,175	98,84%
Intensifikasi Pemungutan PBB	326,493,000	100.00%	310,449,775	95,09%
Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	217,432,000	100.00%	216,671,050	99,65%
Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	51,700,000	100.00%	51,512,775	99,64%
Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	909,219,000	100.00%	379,577,750	41,75%
Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	65,649,000	100.00%	65,534,600	99,83%
Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	195,613,000	100.00%	190,756,825	97,52%
Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	119,485,000	100.00%	115,048,475	96,29%
Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	48,157,000	100.00%	47,141,025	97,89%
Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	121,504,000	100.00%	117,118,100	96,39%
Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	267,046,000	100.00%	262,803,250	98,41%
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang Pendapatan Daerah	68,257,000	100.00%	68,131,585	99,82%
Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	64,116,000	100.00%	62,578,075	97,60%
Intensifikasi Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6,592,000	100.00%	4,110,250	62,35%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50,000,000	100.00%	44,208,100	88,42%
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	126,651,000	100.00%	125,011,300	98,71%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	61,834,000	100.00%	59,012,400	95,44%
Penataan Dokumen Pajak Daerah Elektronik	28,725,000	100.00%	28,709,500	99,95%
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtempahan	59,710,000	100.00%	45,962,100	76,98%
Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	73,240,000	100.00%	56,964,500	77,78%
Pemusnahan Barang Milik Daerah	10,989,000	100.00%	10,658,100	96,99%
Peneitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	17,849,000	100.00%	16,198,425	90,75%
Pengadaan Mebel	193,550,000	100.00%	190,632,000	98,49%
Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	226,100,000	100.00%	225,032,000	99,53%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	150,000,000	100.00%	147,850,000	98,57%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	449,050,000	100.00%	424,281,000	94,48%
Penyusunan DED Kompleks Kantor Walikota Sisi Barat	50,750,000	100.00%	50,393,000	99,30%
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	10,000,000	100.00%	9,988,000	99,88%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	150,000,000	100.00%	147,850,000	98,57%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	449,050,000	100.00%	424,281,000	94,48%
Penyusunan DED Kompleks Kantor Walikota Sisi Barat	50,750,000	100.00%	50,393,000	99,30%
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	10,000,000	100.00%	9,988,000	99,88%
	18.809.072.000,00	100.00%	16.361.640.076,00	86,99%

Sedangkan apabila dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja BPKAD Tahun 2017 dan proyeksi capaian kinerja Tahun 2018 sampai dengan triwulan I secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	SPM / Stand ar Nasio nal	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catat an Anal sis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018 (TWII)	20 19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Derajat otonomi fiskal	-	-	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%		34,82%	36,64%		
2.	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	-	-	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%		61,16%	67,28%		
3.	Rasio pajak daerah terhadap PAD	-	-	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	11,51%	13,36%	12,95%		
4.	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	-	-	3,12 %	4,20 %	3,63 %	3,33 %	3,03%	2,67%	2,18%		
5.	Prosentase pertumbuhan PAD	-	-	16,57 %	18,44%	19,18 %	12,83 %	17,97%	5,67%	7,32%		
6.	Penerapan ASB dalam proses penganggaran	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %		
7.	Persetujuan Raperda tentang APBD	-	-	Minggu I Oktober s/d 31 November		Minggu IV November	-					
8.	Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan	-	-	Minggu II September s/d akhir September		Minggu IV September	-					
9.	Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Jumlah sisidur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	-	-	1	1	5	5	1	5	-		
11.	Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	-	-	78%	81%	84%	87%	100%	100%	100%		
12.	Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD	-	-	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli		Juni	Evaluasi Gubernur		
13.	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang			55%	60%	65%	70%		72,44%	72,44%		
14.	Barang Milik yang didayagunakan			100%	100%	100%	100%		100%	100%		
15.	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu			50%	50%	75%	100%		100%	89,65%		
16.	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu			50%	100%	100%	100%		100%	100%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, maka tugas pokok BPKAD Kota Magelang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Adapun hambatan dan langkah antisipatif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	RESIKO/ HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1.	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang harus segera diterapkan	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasinya secara kontinyu.
2.	Masih terdapat pajak/retribusi daerah yang belum bisa diterapkan penerimanya melalui online atau transaksi secara non tunai, misal Pajak Bumi dan Bangunan serta Retribusi Parkir. Hal ini dikarenakan kompleksitas penanganan pajak/retribusi itu sendiri, misalnya adalah jumlah wajib pajak yang sangat banyak dan nominal pembayaran yang terlalu kecil	<ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan data penerimaan pajak/retribusi daerah secara riil time- Peningkatan pembinaan/edukasi terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi- Peningkatan penerapan teknologi
3.	Belum optimalnya pengelolaan asset maupun Barang Milik Daerah yang terdapat pada OPD-OPD	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pembinaan, rekonsiliasi, dan asistensi secara kontinyu kepada para Pengurus Barang di OPD-OPD- Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan BMD yang ada, terutama Sistem Informasi Persediaan Barang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa penyusunan Renja BPKAD telah mendasar pada rancangan awal RKPD Tahun 2018 dan secara fokus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPKAD.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Pada Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada. dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan secara keseluruhan tidak berubah. Hanya ada 1 (satu) penambahan kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu Kegiatan Penyusunan Perubahan Renstra OPD yang merupakan penambahan kegiatan seragam untuk OPD sekota Magelang guna mengampu perubahan-perubahan target, sasaran, maupun indikator-indikator kegiatan yang terdapat pada OPD-OPD yang muaranya adalah mendukung target sasaran maupun indikator pada RPJMD Kota Magelang 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Sedangkan kalau dilihat dari rancangan awal RKPD 2019, pagu BPKAD adalah sebesar Rp. 19.027.767.000,- (sembilan belas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan pada rancangan akhir bertambah sebesar Rp. 10.045.000,- (sepuluh juta empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 19.037.812.000,- (sembilan belas milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Penambahan tersebut terdapat pada penambahan 1(satu) kegiatan seperti yang disebutkan di atas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Pemerintah Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.144.277.000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.144.277.000	
1	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	BPKAD	laporan bulanan	12 laporan	104.314.000	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	BPKAD	laporan bulanan	12 laporan	104.314.000	
2	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	BPKAD	perwal ASB	1 perwal	105.000.000	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	BPKAD	perwal ASB	1 perwal	105.000.000	
3	Penyusunan laporan posisi kas daerah	BPKAD	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	43.486.000	Penyusunan laporan posisi kas daerah	BPKAD	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	43.486.000	
4	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	laporan database BPKAD	4 laporan	29.726.000	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	laporan database BPKAD	4 laporan	29.726.000	
5	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	219.568.000	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	219.568.000	
6	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	BPKAD	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 Laporan	76.264.000	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	BPKAD	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 Laporan	76.264.000	
7	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	rancangan perda tentang APBD	1 raperda	443.834.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	rancangan perda tentang APBD	1 raperda	443.834.000	
8	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	243.813.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	243.813.000	
9	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	rancangan perda tentang perubahan APBD	1 raperda	372.118.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	rancangan perda tentang perubahan APBD	1 raperda	372.118.000	
10	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 raperwal	344.011.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 raperwal	344.011.000	

11	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	216.373.000	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	216.373.000	
12	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	93.755.000	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	93.755.000	
13	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	186.717.000	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	BPKAD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	186.717.000	
14	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	97.115.000	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	97.115.000	
15	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	43.359.000	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	43.359.000	
16	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	50.700.000	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	50.700.000	
17	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	BPKAD	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD	74.783.000	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	BPKAD	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD	74.783.000	
18	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	BPKAD	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	37.890.000	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	BPKAD	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	37.890.000	
19	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	46.627.000	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	46.627.000	
20	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	49.916.000	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	49.916.000	
21	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	BPKAD	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	225.631.000	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	BPKAD	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	225.631.000	
22	Workshop pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	peserta workshop pengelolaan keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	73 pegawai	80.517.000	Workshop pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	peserta workshop pengelolaan keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	73 pegawai	80.517.000	
23	Penyusunan data keuangan daerah	BPKAD	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	95.583.000	Penyusunan data keuangan daerah	BPKAD	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	95.583.000	

24	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	BPKAD	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	128.959.000	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	BPKAD	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	128.959.000	
25	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	BPKAD	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregristrasi)	3000 SP2D	158.713.000	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	BPKAD	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregristrasi)	3000 SP2D	158.713.000	
26	Pengesahan dan penerbitan SPD	BPKAD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	56.488.000	Pengesahan dan penerbitan SPD	BPKAD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	56.488.000	
27	Pengendalian dan penerbitan SPM	BPKAD	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	34.465.000	Pengendalian dan penerbitan SPM	BPKAD	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	34.465.000	
28	Penyusunan anggaran kas	BPKAD	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	29.805.000	Penyusunan anggaran kas	BPKAD	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	29.805.000	
29	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	BPKAD	Jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	146.514.000	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	BPKAD	Jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	146.514.000	
30	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	BPKAD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	41.699.000	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	BPKAD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	41.699.000	
31	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	BPKAD	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	111.920.000	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	BPKAD	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	111.920.000	
32	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	BPKAD	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	27.442.000	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	BPKAD	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	27.442.000	
33	Pembuatan Daftar Gaji	BPKAD	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	140.821.000	Pembuatan Daftar Gaji	BPKAD	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	140.821.000	
34	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	232.322.000	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	232.322.000	
35	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	BPKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	207.514.000	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	BPKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	207.514.000	
36	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	Laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan OPD	115.835.000	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	BPKAD	Laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan OPD	115.835.000	
37	Penyusunan laporan pajak	BPKAD	Jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	108.527.000	Penyusunan laporan pajak	BPKAD	Jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	108.527.000	

38	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	BPKAD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	61.118.000	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	BPKAD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	61.118.000	
39	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	249.975.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	249.975.000	
40	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	BPKAD	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	42.546.000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	BPKAD	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	42.546.000	
41	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	480.853.000	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	480.853.000	
42	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	34.784.000	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	34.784.000	
43	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	56.356.000	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	56.356.000	
44	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	200.028.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	200.028.000	
45	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	196.493.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	196.493.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				208.968.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				219.013.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	BPKAD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	45.218.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	BPKAD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	45.218.000	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.613.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.613.000	
3	Penyusunan Rencana Kerja OPD	BPKAD	renja penetapan dan renja perubahan	2 jenis dokumen	7.968.000	Penyusunan Rencana Kerja OPD	BPKAD	renja penetapan dan renja perubahan	2 jenis dokumen	7.968.000	
4	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	BPKAD	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	108.755.000	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	BPKAD	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	108.755.000	

5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	BPKAD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6.166.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	BPKAD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6.166.000	
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	BPKAD	RKA dan RKPA	2 dokumen	27.248.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	BPKAD	RKA dan RKPA	2 dokumen	27.248.000	
7						Penyusunan Rencana Strategis OPD	BPKAD	Terwujudnya perubahan Renstra OPD	1 Dokumen	10.045.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.007.614.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.007.614.000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD	surat masuk dan keluar	12 bulan	1.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD	surat masuk dan keluar	12 bulan	1.000.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 bulan	365.120.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 bulan	365.120.000	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	806.229.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	806.229.000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	24.190.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	24.190.000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60.564.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60.564.000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.500.000	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.500.000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.971.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.971.000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5.926.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5.926.000	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	5.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	5.400.000	
10	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD	tersedianya logistik kantor	3 jenis	10.127.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD	tersedianya logistik kantor	3 jenis	10.127.000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	105.862.000	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	105.862.000	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	koordinasi antar daerah	12 bulan	281.190.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	koordinasi antar daerah	12 bulan	281.190.000	
13	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	BPKAD	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak / honorer daerah	169.479.000	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	BPKAD	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak / honorer daerah	169.479.000	

14	Pengelolaan administrasi kepegawaian	BPKAD	laporan administrasi kepegawaian	82 file	112.056.000	Pengelolaan administrasi kepegawaian	BPKAD	laporan administrasi kepegawaian	82 file	112.056.000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.307.089.000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.307.089.000	
1	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	BPKAD	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	145.187.000	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	BPKAD	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	145.187.000	
2	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	BPKAD	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek pajak PBB	219.676.000	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	BPKAD	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek pajak PBB	219.676.000	
3	Implementasi Tapping Box	BPKAD	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.643.000	Implementasi Tapping Box	BPKAD	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.643.000	
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4 laporan, 1 pameran	317.051.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4 laporan, 1 pameran	317.051.000	
5	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	BPKAD	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.759.000	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	BPKAD	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.759.000	
6	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	BPKAD	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlanyaninya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	BPKAD	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlanyaninya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000	
7	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	139.672.000	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	139.672.000	
8	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	BPKAD	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 data wajib pajak	162.879.000	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	BPKAD	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 data wajib pajak	162.879.000	
9	Intensifikasi Pemungutan PBB	BPKAD	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000	Intensifikasi Pemungutan PBB	BPKAD	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000	
10	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	BPKAD	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	418.906.000	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	BPKAD	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	418.906.000	

11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	BPKAD	penghapusan data piutang	12 bulan	166.329.000	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	BPKAD	penghapusan data piutang	12 bulan	166.329.000	
12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 bulan	107.654.000	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 bulan	107.654.000	
13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	BPKAD	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	BPKAD	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000	
14	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	BPKAD	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.093.000	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	BPKAD	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.093.000	
15	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	BPKAD	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.683.000	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	BPKAD	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.683.000	
16	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	BPKAD	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	199.667.000	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	BPKAD	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	199.667.000	
17	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	BPKAD	laporan bulanan dan triwulan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	140.237.000	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	BPKAD	laporan bulanan dan triwulan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	140.237.000	
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	BPKAD	jumlah peserta	540 wajib pajak	54.674.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	BPKAD	jumlah peserta	540 wajib pajak	54.674.000	
19	Evaluasi Bulanan dan Triwulan Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.162.000	Evaluasi Bulanan dan Triwulan Pendapatan Daerah	BPKAD	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.162.000	
20	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	BPKAD	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	BPKAD	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000	

	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				697.303.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				697.303.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	gedung yang terpelihara	1 unit	84.157.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	gedung yang terpelihara	1 unit	84.157.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	359.912.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	359.912.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	36.984.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	36.984.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	207.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	207.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD	jumlah mebeleur yang diperbaiki	37 buah	9.250.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD	jumlah mebeleur yang diperbaiki	37 buah	9.250.000	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				150.858.000	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				150.858.000	
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	BPKAD	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	150.858.000	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	BPKAD	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	150.858.000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				6.511.658.000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				6.511.658.000	
1	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	BPKAD	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	66.900.000	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	BPKAD	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	66.900.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	BPKAD	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	433.984.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	BPKAD	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	433.984.000	
3	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	BPKAD	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	58.476.000	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	BPKAD	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	58.476.000	
4	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	BPKAD	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	40.000.000	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	BPKAD	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	40.000.000	
5	Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Pengelolaan BMD	13 orang	489.250.000	Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Pengelolaan BMD	13 orang	489.250.000	
6	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	
7	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	

8	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	BPKAD	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan /jasa, perkantoran)	120.925.000	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	BPKAD	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan /jasa, perkantoran)	120.925.000	
9	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	BPKAD	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	39.693.000	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	BPKAD	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	39.693.000	
10	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	184.765.000	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	184.765.000	
11	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	BPKAD	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelolaan barang	92.220.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	BPKAD	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelolaan barang	92.220.000	
12	Penyelamatan asset daerah	BPKAD	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	124.516.000	Penyelamatan asset daerah	BPKAD	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	124.516.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	BPKAD	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	215.080.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	BPKAD	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	215.080.000	
14	Penghapusan Asset	BPKAD	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	78.678.000	Penghapusan Asset	BPKAD	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	78.678.000	
15	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	BPKAD	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	52.521.000	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	BPKAD	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	52.521.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	BPKAD	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	142.444.000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	BPKAD	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	142.444.000	
17	Penaksiran barang milik daerah	BPKAD	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7 rumah dinas/mess	628.612.000	Penaksiran barang milik daerah	BPKAD	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7 rumah dinas/mess	628.612.000	
18	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	BPKAD	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	72.941.000	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	BPKAD	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	72.941.000	
19	Penjualan asset daerah	BPKAD	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 kegiatan	25.617.000	Penjualan asset daerah	BPKAD	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 kegiatan	25.617.000	
20	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	92.230.000	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	92.230.000	

21	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	BPKAD	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	18 unit	40.400.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	BPKAD	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	18 unit	40.400.000	
22	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	BPKAD	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	55.027.000	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	BPKAD	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	55.027.000	
23	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	BPKAD	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	115.696.000	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	BPKAD	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	115.696.000	
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3 gedung kantor	354.195.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3 gedung kantor	354.195.000	
25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	BPKAD	tanah yang diukur	2 bidang	18.070.000	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	BPKAD	tanah yang diukur	2 bidang	18.070.000	
26	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	3 Kecamatan	54.636.000	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	3 Kecamatan	54.636.000	
27	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	BPKAD	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang	1 Perwal	47.575.000	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	BPKAD	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang	1 Perwal	47.575.000	
28	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	2 Bus	2.450.961.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	2 Bus	2.450.961.000	
JUMLAH					19.027.767.000	JUMLAH				19.037.812.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPKAD merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum fungsi penunjang, yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Namun demikian terkait dengan usulan aloksi untuk hibah dan bansos yang berupa uang, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasar rekomendasi dari OPD pengampu hibah bansos sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan adalah "*Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif*"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2019 BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah disampaikan pada Bab III RPJMD, BPKAD Kota Magelang mendukung untuk mewujudkan visi “**MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS**”, adapun telaah dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kota Jasa

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

3. Kota Cerdas

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun complain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) *Smart Economy*, yaitu: pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif; (4) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

4. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

5. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketakwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya

pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan jabaran atas Visi-Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, BPKAD bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi kota jasa yang modern dan cerdas, dengan mendukung Misi 1 *“Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas.

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif, dengan indikator :

- Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP

Tujuan 3 : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan.

Sasaran 5 : Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator :

- Derajat Otonomi Fiskal
- Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap Dana Pusat

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatannya pada bidang-bidang guna mencapai indikator sasaran tersebut.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang direncanakan BPKAD Kota Magelang untuk dilaksanakan pada tahun 2019 adalah terdiri dari 7 program dan 120 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program ini bertujuan untuk melaksanakan serta meningkatkan tata kelola arsip daerah yang terdapat pada OPD. Pagu yang direncanakan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.658.000,-.

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Pada tahun 2019 untuk melaksanakan program ini diusulkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.007.614.000,-

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas, efisiensi serta peningkatan kinerja. Untuk program ini diusulkan pagu sebesar Rp. 697.303.000,-.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sehingga dapat menyelenggarakan tugas maupun urusan pemerintahan dengan optimal. Pada tahun 2019 diusulkan pagu sebesar Rp. 219.013.000,-

5. Program Peningkatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan dalam mengelola Laporan Keuangan Daerah. Pada rencana tahun 2019 diusulkan pagu sebesar Rp. 6.144.277.000,- untuk pagu ini.

6. Program Peningkatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan dalam mengelola pendapatan daerah. Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program ini diusulkan pagu sebesar rp. 3.307.089.000,-

7. Program Peningkatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan dalam mengelola barang milik daerah dan juga asset-aset milik Pemerintah Kota Magelang. Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program ini diusulkan pagu sebesar Rp. 6.511.658.000,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD. Program, kegiatan dan pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan BPKAD Kota Magelang bisa dilihat pada tabel matriks rencana kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 yang tertuang pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	TOLOK UKUR	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TAR3	Tahun 2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun 2020			
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan										
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			308.009.680		578.358.000		398.169.939			
4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	100	134.350.000	12 laporan	104.314.000	100	148.100.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	3	173.659.680	1 perwal	105.000.000	3	250.069.939	BPKAD	DAU	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan			12 laporan	43.486.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD			4 laporan	29.726.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi			29 OPD	219.568.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK			7 Laporan	76.264.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			9.701.491.760		2.301.011.000		3.674.021.881	BPKAD		
4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	4	450.000.000	1 raperda	443.834.000	4	544.500.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3	351.216.000	3 dokumen	243.813.000	3	465.000.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	4	3.898.700.000	1 raperda	372.118.000	4	475.000.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM

4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentangpenjabaran perubahan APBD	4	3.853.200.000	2 raperwal	344.011.000	4	466.239.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2	248.200.000	2 dokumen	216.373.000	2	300.000.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2	137.659.000	2 dokumen	93.755.000	2	198.200.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2	280.785.600	2 dokumen	186.717.000	2	404.331.264	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2	130.014.720	2 dokumen	97.115.000	2	187.221.197	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	48	41.554.000	29 OPD	43.359.000	48	98.927.309	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	48	48.158.000	29 OPD	50.700.000	48	96.391.296	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	100	79.719.000	29 OPD	74.783.000	100	93.975.552	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2	30.827.520	2 laporan	37.890.000	2	44.391.629	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	48	44.667.000	29 OPD	46.627.000	48	102.452.429	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	48	51.649.000	29 OPD	49.916.000	48	117.987.840	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM

4.4.15.56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik (perda APBD, perwal APBD, perda perubahan APBD, perwal perubahan APBD, RKA, DPA, anggaran kas, RKPA, DPPA, anggaran kas perubahan)	12	55.141.920	10 jenis dokumen	0	12	79.404.365	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			671.581.000		401.731.000		726.111.000	BPKAD	DAU	
4.4.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	file dokumen pencairan dana belanja langsung	12	178.961.000	4 dokumen	0	12	204.894.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	3	405.753.000	74 sekolah	225.631.000	3	464.547.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	6	49.497.000	73 pegawai	80.517.000	6	56.670.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	100	37.370.000	12 laporan	95.583.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.059.964.000		876.826.000		1.236.800.000	BPKAD		
4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	370	175.829.000	6 laporan	128.959.000	370	238.500.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregristrasi)	100	172.601.000	3000 SP2D	158.713.000	100	271.000.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	100	82.303.000	10 jenis	56.488.000	100	119.900.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	100	24.386.000	700 SPM	34.465.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	100	18.553.000	10 kegiatan	29.805.000	100	27.000.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM

4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	100	203.814.000	800 berkas	146.514.000	100	258.500.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1350	75.706.000	1100 SP2D	41.699.000	1350	121.000.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	100	134.973.000	1500 berkas	111.920.000	100	161.700.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	100	26.925.000	4 jenis dokumen	27.442.000	100	39.200.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	1400	144.874.000	470 daftar gaji	140.821.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.596.430.500		1.533.474.000		1.391.132.000			
4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	3	295.064.000	1 aplikasi	232.322.000	3	391.779.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	612	214.755.000	12 dokumen	207.514.000	612	249.161.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	552	129.766.500	348 laporan OPD	115.835.000	552	96.300.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	84	92.260.000	12 laporan	108.527.000	84	140.685.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	100	58.023.000	12 laporan	61.118.000	100	70.525.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100	257.634.000	120 orang	249.975.000	100	361.427.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	88	59.170.000	1 dokumen	42.546.000	88	81.255.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12	452.253.000	12 laporan	480.853.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	1	37.505.000	2 kegiatan	34.784.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			239.892.100		223.968.000		389.614.368			
4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12	60.355.000	12 dokumen	45.218.000	12	135.831.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM

4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	3	14.116.000	2 jenis laporan	13.613.000	3	17.128.506	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	renja penetapan dan renja perubahan	2	23.541.100	2 jenis dokumen	7.968.000	2	28.484.731	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	12	81.292.000	1500 berkas	108.755.000	12	118.657.985	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	12.851.000	1 dokumen	6.166.000	1	21.274.837	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2	47.737.000	2 dokumen	27.248.000	2	68.237.309	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terwujudnya perubahan Renstra OPD			1 Dokumen	10.045.000		0	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			108.927.000		366.120.000		120.092.017			
4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12	1.102.500	12 bulan	1.000.000	12	1.215.506	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12	107.824.500	12 bulan	365.120.000	12	118.876.511	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.130.572.000		1.641.494.000		2.226.638.484			
4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12	887.406.000	12 bulan	806.229.000	12	897.256.000	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	64	30.530.000	65 kendaraan	24.190.000	64	22.754.277	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	12	97.576.000	22 jenis/item	60.564.000	12	63.262.238	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	41.000.000	48 jenis	34.500.000	12	49.835.756	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	32.751.000	15 jenis	25.971.000	12	38.774.649	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12	44.422.800	17 jenis	5.926.000	12	33.304.871	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2	20.000.000	3 jenis	5.400.000	2	46.675.440	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24	12.672.000	3 jenis	10.127.000	24	4.375.823	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	107.004.000	12 bulan	105.862.000	12	118.234.724	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12	285.545.000	12 bulan	281.190.000	12	262.949.252	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	23	446.665.200	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	169.479.000	23	594.405.966	BPKAD	DAU	ExBAU

4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82	125.000.000	82 file	112.056.000	82	94.809.488	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			189.995.670		56.356.000		144.800.000			
4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1	56.356.000	1 dokumen	56.356.000	1	83.400.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	dokumen pedoman penganggaran daerah	2	133.639.670	1 dokumen	0	1	61.400.000	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			407.954.000		396.521.000		624.391.000			
4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	520	206.558.000	1 perda	200.028.000	520	312.785.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	120	201.396.000	1 perwal	196.493.000	120	311.606.000	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.467.008.000		3.307.089.000		3.236.630.093	BPKAD	DAU	
4.4.18.22	Penataan Dokumen Pajak Daerah Elektronik	arsip dokumen pajak daerah dalam bentuk elektronik			12 dokumen	0		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT			36200 SPPT	145.187.000		0	Kota Magelang	DAU	Rencana
4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitalisasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan			1 peta obyek pajak PBB	219.676.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak			100 laporan	93.643.000		0	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	DAU	Rencana
4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4	239.782.000	4 laporan, 1 pameran	317.051.000	4	350.491.227	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subjek dan Obyek Pajak	laporan potensi subjek dan obyek pajak	2	38.463.000	4 laporan	50.759.000	2	48.747.210	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayaninya wajib pajak BPHTB			12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000		0	BPKAD	DAU	Rencana

4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12	126.500.000	12 laporan	139.672.000	12	220.786.280	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120	188.053.000	120 data wajib pajak	162.879.000	120	172.087.386	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	4	281.448.000	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000	4	436.006.052	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12	406.219.000	12 bulan	418.906.000	12	567.439.773	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	6	195.613.000	12 bulan	166.329.000	6	413.480.873	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12	135.250.000	12 bulan	107.654.000	12	140.421.360	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	20	51.357.000	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000	20	70.506.664	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	100	281.946.000	17 kelurahan	281.093.000	100	390.982.049	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50	119.916.000	50 SK	103.683.000	50	92.993.776	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28	207.360.000	28 laporan	199.667.000	28	332.687.443	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16	140.049.000	16 laporan	140.237.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta		55.052.000	540 wajib pajak	54.674.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Perijinan Tertentu			1 Raperda	0		0	BPKAD	DAU	Rencana

4.4.18.20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal PBB			1 perwal	0		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah			12 laporan	53.162.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT			800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.297.689.563		697.303.000		973.073.528			
4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1	80.415.000	1 unit	84.157.000	1	88.306.529	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64	784.767.000	52 unit	359.912.000	64	554.878.603	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33	24.282.563	39 unit	36.984.000	33	26.771.525	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7	238.675.000	6 jenis	207.000.000	7	294.365.226	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20	7.200.000	37 buah	9.250.000	20	8.751.645	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, laptop, printer, scanner		0	10 buah	0		0	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	ruang rapat	127,4	162.350.000	1 unit	0		0	BPKAD	DAU	ExBAU
4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, mic, wireless, stand mic, proyektor			12 buah	0		0	BPKAD	DAU	ExBAU

2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan										
2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			139.610.000		150.858.000		165.500.000			
				839.992.000				917.944.000			
	SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln			12 bln	29,500,000			
	DPPKD		143,000,000					157,600,000			
	KESBANGPOL		28,587,000					34,590,000			
	BKD		15,000,000					15,000,000			
	DPP		25,830,200					31,254,542			
	LITBANG		50,000,000					70,000,000			
	PERPUS		247,075,000					270,500,000			
	Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%				
	Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%				
	Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%				
2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6	139.610.000	40000 dokumen	150.858.000	6	165.500.000	BPKAD	DAU	ExBAU
4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan										
4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0		6.511.658.000		0			
4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda			223 bidang	66.900.000			0	BPKAD	DAU
4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara			18 unit	433.984.000			0	BPKAD	DAU
4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pernkot Magelang			4 laporan	58.476.000			0	BPKAD	DAU
4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor			20 SPPT	40.000.000			0	BPKAD	DAU
4.4.19.34	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD			13 orang	489.250.000			0	BPKAD	DAU
4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot			1 laporan	87.439.000			0	BPKAD	DAU
											Program prioritas RPJM

4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD			4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	120.925.000			0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga			3 kegiatan penelitian	39.693.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah			8 jenis laporan	184.765.000			0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD			185 pejabat pengelolaan barang	92.220.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah			10 dokumen	124.516.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.16	Penyelamatan asset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah			12 laporan bulanan	215.080.000			0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			2 lapangan	78.678.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak			4 paket	52.521.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir			12 kegiatan	142.444.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun			7 rumah dinas/mess	628.612.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	pengelolaan BMD			13 orang	0			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah			4 kegiatan	72.941.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan			4 kegiatan	25.617.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.15	Penjualan asset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual			3 paket	92.230.000			0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	pemanfaatan dan panatagunaan tanah Pemkot			3 kecamatan	0			0	BPKAD	DAU	Rencana

4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah			12 bidang	328.807.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus			18 unit	40.400.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtempahan	nilai dasar penjualan BMD			3 kegiatan	55.027.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD			11 kegiatan	115.696.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			3 gedung kantor	354.195.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur			2 bidang	18.070.000		0	BPKAD	DAU	Program prioritas RPJM
4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot			3 Kecamatan	54.636.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.33	Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	Peraturan Walikota tentang Kodefikasi barang			1 Perwal	0		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.36	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pengelolaan Barang Milik Daerah			3 gedung	0		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.37	Program Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah			2 Bus	0		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.38	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang			1 Perwal	47.575.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
4.4.19.39	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah			2 Bus	2.450.961.000		0	BPKAD	DAU	Rencana
		TOTAL		20.319.125.273		19.037.812.000		15.306.974.310			

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun ke depan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dimana keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi, dan komitmen yang kuat dari seluruh personil.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Kota Magelang Tahun 2019, Renja BPKAD Kota Magelang memiliki kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 berisi perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
2. Seluruh jajaran pegawai pada BPKAD Kota Magelang berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2019, Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitasnya ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada Bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.

Magelang, 13 Juli 2018





**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050 / 104 / 112 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2019 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahan oleh Walikota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2019 untuk Perangkat Daerah se-Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Juli 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN

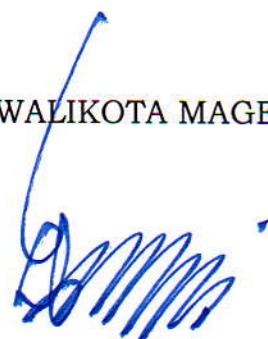
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050 / 109 / 112 TAHUN 2018
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

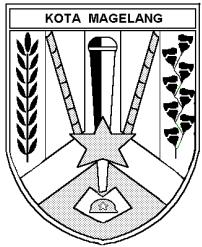
NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.917.120.000
2	Dinas Kesehatan	44.131.370.000
3	BLUD RSU Tidar	240.307.611.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.248.294.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.438.093.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.820.498.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.548.746.000
8	Dinas Sosial	3.177.690.000
9	Dinas Tenaga Kerja	6.438.096.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	41.350.065.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.882.922.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.741.814.000
13	Dinas Perhubungan	7.810.900.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.624.562.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.633.469.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.582.196.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.265.933.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan	6.434.453.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.806.930.000
20	Sekretariat Daerah	26.652.954.000
21	Sekretariat DPRD	19.388.510.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	6.855.432.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	7.857.251.000
24	Kecamatan Magelang Utara	7.251.383.000
25	Inspektorat	10.665.741.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.473.972.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.042.767.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.924.305.000
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.605.389.000
	TOTAL	673.878.466.000

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293) 364910

MAGELANG
56101

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 050 / 207 / 440 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Renja OPD) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Renstra OPD);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang;
19. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/104/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2019;
20. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

- KESATU : Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2019.
- KEDUA : Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2019 disusun sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2017
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA MAGELANG
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV : PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Juli 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

